



**BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

**Disusun Oleh :
AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
19720802 200212 1 004**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja bidang terutama organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan sumber daya aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Lumajang, 7 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



AGUS SETIAWAN, S.P., M.Si

MP 19720802 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

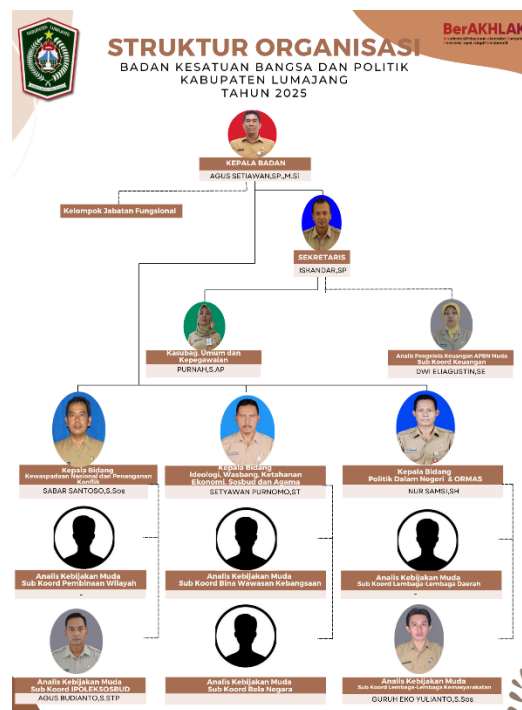
Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
- f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dapat diuraikan sebagai berikut (Gambar 1.1.)

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Luar Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG



Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol selama Tahun 2025 didukung sumber daya berupa sumber daya manusia sebanyak 36 orang dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 1.1. dan sumber daya lainnya sebagaimana Tabel Lampiran 2.

Tabel 1.1.

Sumber Daya Manusia Bakesbangpol Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	GOL. RUANG	L/P	JABATAN	Pendidikan	Diklat Pim	Status
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGUS SETIAWAN, SP., M.Si NIP. 19720802 200212 1 003	IV/b	L	Kepala Bakesbangpol	S2	Diklat Pim III	ASN
SEKRETARIAT							
1	ISKANDAR, SP NIP. 19691009 199803 1 007	IV/b	L	Sekretaris	S1	Diklat Pim III	ASN
2	PURNAH, S.AP NIP. 19740804 199703 2 004	III/d	P	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	S1	Diklat Pim IV	ASN
3	DWI ELIAGUSTIN, SE NIP. 19780811 201101 2 005	III/d	P	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda	S1	Diklat Pim IV	ASN
4	PERKASA WIJAYANTO NIP. 19851119 200604 1 003	III/a	L	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-	ASN
5	TOTOK HERI SUDARWANTO NIP. 19781103 200901 1 002	III/a	L	Penelaah Teknis Kebijakan	SMA	-	ASN
6	KARMAN NIP. 19680417 199403 1 013	II/d	L	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-	ASN
7	RIRIN DWI HARIANTI NIP. 19790103 200801 2 016	II/d	P	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-	ASN
8	SURAHMAN	-	L		SMA	-	ASN

	NIP. 19710303 202521 1 026			Operator Layanan Operasional			
9	JOHAN TRI LAKSONO	-	L	Operator Layanan Operasional	SMA	-	ASN
	NIP. 19871101 202521 1 059						
10	BELIA PRISMASARI NAHESTIAN, S.AP	-	P	Operator Layanan Operasional	D1	-	ASN
	NIP. 19940509 202521 2 076						
11	ERIK MARTA EFENDI, SH	-	L	Penata Layanan Operasional	S1	-	ASN
	NIP. 19910610 202521 1 081						
12	ENDANG YULININGSIH, S.AP	-	P	Penata Layanan Operasional	S1	-	ASN
	NIP. 19931110 202521 2 088						
13	EVA RETNO WULANSARI	-	P	Operator Layanan Operasional	SMA	-	ASN
	NIP. 19920513 202521 2 053						
14	SOFA INDAH MARWAH, SH	-	P	Penata Layanan Operasional	S1	-	ASN
	NIP. 19940521 202521 2 073						
BIDANG. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK							
1	SABAR SANTOSO, S.Sos	IV/b	L	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	S-1	Diklat Pim III	ASN
	NIP. 19671226 198903 1 006						
2	AGUS BUDIANTO, S.STP	IV/a	L	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1	Diklat Pim III	ASN
	NIP. 19760818 199701 1 001						
3	SUDARSONO	III/a	L	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-	ASN
	NIP. 19780611 200801 1 013						
4	ERIK EFENDI	III/a	L	Pengadministrasi Perkantoran	S-1	-	ASN
	NIP. 19820115 200901 1 010						
5	ANDI OKTARYANTO, SE	IX	L	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19761021 202521 1 005						
6	VENTI PUSPITASARI, S.E	IX	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19921016 202521 2 006						

7	MUHAMMAD ANWARI, SH	-	L	Penata Layanan Operasional	S-1	-	ASN
	NIP. 19920907 202521 1 092						
8	RICO ARTA DINATA	-	L	Operator Layanan Operasional	SMA	-	ASN
	NIP. 19980203 202521 1 038						
9	MOHAMMAD IMAN HAKIKI, SH	-	L	Penata Layanan Operasional	SMA	-	ASN
	NIP. 19971105 202521 1 120						
10	BAGAS WAHYUNO, SH	-	L	Penata Layanan Operasional	S-1	-	ASN
	NIP. 19930103 202521 1 091						
BIDANG. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
1	NUR SAMSI, SH	IV/a	L	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	S-1	Diklat Pim IV	ASN
	NIP. 19690203 199302 1 001						
2	GURUH EKO YULIANTO, S.Sos	III/d	L	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1	-	ASN
	NIP. 19790707 200801 1 021						
3	ALEX SUGIHARTO, S.AB	III/a	L	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19901218 202504 1 001						
4	AULIA FAHIRA MAJIDAH, S.M.	III/a	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19981222 202504 2 003						
5	FATONI NUR WAHYUDI, SH	-	L	Penata Layanan Operasional	S-1	-	ASN
	NIP. 19940410 202521 1 052						
6	VIVIN NUR HIDAYAH, SH	-	P	Penata Layanan Operasional	S-1	-	ASN
	NIP. 19930302 202521 2 057						
BIDANG. IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA							
1	SETYAWAN PURNOMO, ST, M.T	IV/a	L	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	S2	Diklat Pim IV	ASN
	NIP. 19710710 200604 1 016						
2	NENENG MURTININGSIH	III/a	P	Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-	ASN
	NIP. 19741216 200701 2 009						

3	SHILDAH ROHMAWATI, S.AB	IX	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19940108 202521 2 005						
4	BERTHA VIQIE LORENTYA, S.Sos	IX	P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1	-	ASN
	NIP. 19940924 202521 2 012						
5	INDRA NURCAHYO, SE	-	L	Penata Layanan Operasional	S-1	-	ASN
	NIP. 19771218 202521 1 017						

B. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana tujuan yang ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2025 – 2029, Tujuan Bakesbangpol adalah terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Bakesbangpol dihadapkan dengan beberapa permasalahan, sebagaimana disajikan dalam kolom berikut :

Tabel 1.2.

Tabel Isu Strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Belum terciptanya rasa aman	Belum terciptanya kondusifitas wilayah	Penurunan kewaspadaan nasional dan Penurunan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial
		Penurunan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Penurunan/Stagnasi Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Penurunan Kemampuan dan Penurunan pengawasan organisasi Kemasyarakatan
		Penurunan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan pemicu terciptanya isu strategis dan harus mendapatkan perhatian karena dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran. Isu-Isu strategis Bakesbangpol, diantaranya :

1. Kondusifitas wilayah;
2. Peredaran dan pemakaian narkoba;

3. Karakter Pancasila;
4. Peran serta lembaga kemasyarakatan
5. Kerukunan umat beragama;
6. Pendidikan politik dan Partisipasi politik;
7. Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

C. STRATEGI ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menghadapi berbagai isu strategis yang dipicu oleh dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Isu-isu tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah apabila tidak ditangani secara tepat. Isu strategis utama meliputi kondusifitas wilayah, peredaran dan pemakaian narkoba, penguatan karakter Pancasila, optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan, kerukunan umat beragama, pendidikan dan partisipasi politik, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Berbagai isu tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan kewaspadaan dini, pembinaan ideologi, peningkatan literasi politik, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Lumajang merumuskan strategi organisasi yang diarahkan pada penguatan kewaspadaan dini dan stabilitas daerah, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor. Strategi ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi Bakesbangpol dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Tahun 2025 merupakan tahun awal pada RPJMD 2025 – 2029. Dalam perjalanannya, Bakesbangpol mengalami perubahan tujuan dan indikator tujuan Tujuan dan sasaran serta indikator masing-masing juga berubah. Secara ringkas dapat digambarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol pada RPJMD 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan
1	2	3	4
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48.78 %
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66.67%

Tabel 2.1. memberikan penjelasan bahwa tujuan bakesbangpol mulai tahun 2025 lebih terukur dengan persentase masalah strategis yang diselesaikan, demikian pula dengan sasaran yang akan diwujudkan, yaitu meningkatnya kondusifitas wilayah dengan indikator prosentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan masalah strategis adalah masalah yang memiliki pengaruh signifikan dan dapat menghambat pembangunan.

Target dari Tujuan dan sasaran Tahun 2025 - 2029 ditetapkan sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	persen	jumlah masalah strategis yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah strategis dikali 100	48,78%	60,98%	73,17%	85,37 %	97,56%
	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait ipoleksosbud yang diselesaikan	persen	jumlah masalah masalah ipoleksosbud yang diselesaikan tahun N dibagi jumlah masalah masalah ipoleksosbud dikali 100	66,67 %	73,33%	80,00%	86,67 %	93,33%

Target yang ditetapkan merupakan kondisi akhir masing-masing pada saat dilakukan pengukuran, sehingga target akhir rencana pembangunan RPJMD 2025 – 2029 dapat digabungkan. Target tujuan tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibanding dengan target tahun 2026.

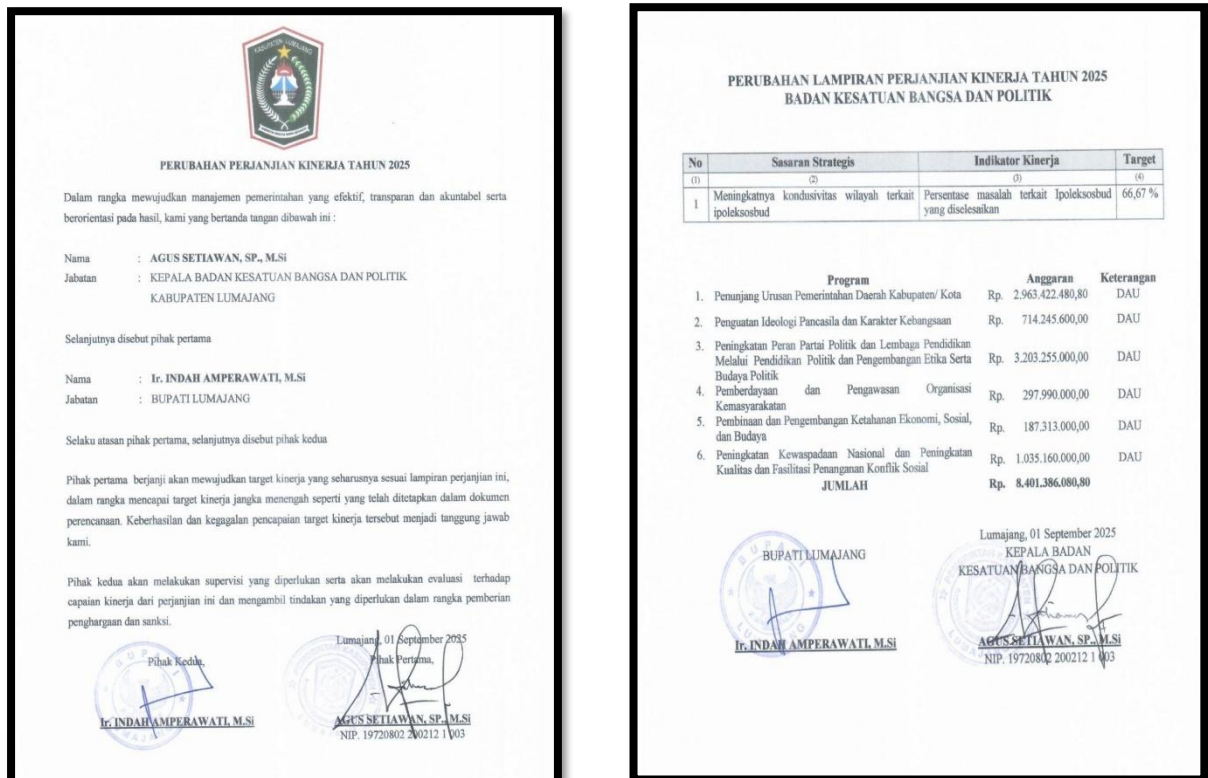
2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, mewajibkan setiap personel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkomitmen untuk melaksanakan semua program dan kegiatan dan diikat dengan Perjanjian Kinerja. Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Gambar 2.1.

Perjanjian Kinerja Kepala Bakesbangpol Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan

menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

**3.1.1. CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TW
IV TAHUN 2025**

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Persentase Masalah Strategis yang diselesaikan	48,78%	19,51%	39,99%
Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66.67%	41,33%	61,99%

3.1.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,64%	1,59%	96%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	0,27%	0,27%	100%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	8,93%	8,93%	100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	9,09%	9,09%	100%

TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	25%	23,74%	94,96%

Tabel 3.2 dan 3.3 menyajikan target dan capaian kinerja dan anggaran program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator program adalah cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Rumusan Indikator ini adalah jumlah masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan DIBAGI jumlah masyarakat DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 96%.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator dari program ini adalah persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik. Rumusan Indikator ini adalah jumlah kader partai politik dan masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik DIBAGI jumlah kader partai politik dan masyarakat DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 100%.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator dari program ini adalah persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif. Rumusan Indikator ini adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif DIBAGI jumlah organisasi kemasyarakatan yang tercatat DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 100%.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator dari program ini adalah persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan. Rumusan Indikator ini adalah jumlah kebijakan yang dilaksanakan DIBAGI dengan kebijakan yang ditetapkan DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator dari program ini adalah persentase Konflik Sosial yang diselesaikan. Rumusan Indikator ini adalah jumlah konflik sosial yang diselesaikan DIBAGI jumlah konflik sosial yang muncul DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 100%.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari program ini adalah persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Rumusan Indikator ini adalah jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi DIBAGI jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan DIKALI 100%. Capaian kinerja program pada tribulan IV tahun 2025 sebesar 94,46%.

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- **Tujuan**

- a. komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang.
- b. kondisi sosial masyarakat Kabupaten Lumajang yang menjunjung nilai kebersamaan, toleransi, dan kearifan lokal. Nilai-nilai sosial yang telah mengakar tersebut menjadi modal sosial yang mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, demokratis, dan menghormati perbedaan.
- c. sinergi lintas sektor yang terbangun dengan Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
- d. peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

- **Sasaran**

- a. berfungsinya mekanisme kewaspadaan dini dan pemantauan kondisi ipoleksosbud yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- b. koordinasi operasional yang efektif dengan unsur Forkopimda dan aparat keamanan.
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, serta fasilitasi kerukunan umat beragama menjadi faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ipoleksosbud.

- d. partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- e. dukungan data dan informasi sosial politik yang relatif memadai sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan langkah-langkah strategis Bakesbangpol dalam menjaga kondusivitas wilayah.

3.2.2 ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Beberapa faktor yang dapat menjadi Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. **Dinamika Sosial Politik yang Tidak Dapat Diprediksi**
Perubahan kondisi sosial dan politik yang terjadi secara cepat dan situasional seringkali berada di luar kendali organisasi, namun berdampak langsung terhadap capaian indikator kinerja.
2. **Keterbatasan Kewenangan Langsung**
Sebagian besar peran Bakesbangpol bersifat koordinatif dan fasilitatif, sehingga pencapaian kinerja sangat bergantung pada dukungan dan sinergi dengan instansi lain.
3. **Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**
Kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya persatuan, toleransi, dan partisipasi politik yang berkualitas dapat menghambat efektivitas program pembinaan.

3.2.3 UPAYA ATAU SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Lumajang dilakukan melalui pendekatan perbaikan berkelanjutan yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya, tata kelola, serta sinergi lintas sektor. Upaya ini diarahkan agar pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

1. Upaya Mengatasi Hambatan pada IKU Tujuan, antara lain :

- Menyelaraskan indikator tujuan dengan indikator antara (intermediate outcome) yang lebih terukur.

- Memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kontribusi Bakesbangpol lebih signifikan terhadap outcome makro.
- Mengembangkan metode pengukuran berbasis survei sederhana, FGD, dan data pendukung yang konsisten.
- Melaksanakan program pembinaan ideologi, demokrasi, dan HAM secara berkelanjutan dan terintegrasi.

2. Upaya Mengatasi Hambatan pada IKU Sasaran, antara lain :

- Memperkuat sistem kewaspadaan dini dan pemetaan potensi konflik berbasis wilayah.
- Meningkatkan intensitas koordinasi operasional dengan Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
- Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mitra deteksi dini.
- Melakukan pendekatan persuasif dan dialog sosial untuk pencegahan konflik

3.2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	41,33%	89.13%	(47,80%

Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja tujuan Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 8.140.507.052,- dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV) sebesar Rp. 7.255.715.024 sehingga penyerapan anggaran sebesar 89.13%.

3.2.5 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.6. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.5.

Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun 2025

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2	3	4	5
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	8.140.507.052	7.255.715.024	89.13%
Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	8.140.507.052	7.255.715.024	89.13%
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	714.245.600	43.164.000	6,04%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	714.245.600	43.164.000	6,04%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	110.486.500	40.235.000	36.42%
Pembentukan Paskibraka	603.759.100	2.929.000	0.49%
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.203.255.000	212.665.000	6.64%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	3.203.255.000	212.665.000	6.64%

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2		3	4	5
	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.550.000	0	0%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3.200.705.000	212.665.000	6.64%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		297.990.000	25.995.580	8.72%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	297.990.000	25.995.580	8.72%

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2		3	4	5
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	297.990.000	25.995.580	8.72%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		187.313.000	67.800.000	36.20%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	187.313.000	67.800.000	36.20%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	187.313.000	67.800.000	36.20%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.035.160.000	530.713.000	51.27%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.035.160.000	530.713.000	51.27%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	166.360.000	45.963.000	27.63%

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2		3	4	5
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	868.800.000	484.750.000	55.80%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.963.422.481	566.013.463	19.10%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.622.416.251	449.350.175	17.13%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.294.251	436.138.175	16.99%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.122.000	13.212.000	23.97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.516.465	16.990.000	30.60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.511.965	200.000	2.35%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.086.500	768.500	24.90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.918.000	16.021.500	38.22%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.874.965	61.407.038	33.40%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.600	6.550.480	23.73%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.274.365	54.856.558	35.10%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.614.800	38.266.250	35.90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	84.705.000	33.886.250	40.01%

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
2		3	4	5
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.909.800	4.380.000	23.16%

Tabel 3.6 memberikan gambaran tentang realiasi anggaran Pada kinerja tujuan dan sasaran selama tribulan IV tahun 2025. Target anggaran sebesar Rp. 8.140.507.052 terealisasi sebesar Rp. 7.255.715.024,- atau sebesar 89.13% dari target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029.
2. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP tentang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi tim kewaspadaan dini tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
3. Penyusunan SK FKDM tingkat Desa/Kelurahan;
4. Peningkatan bantuan keuangan parpol dan pemenuhan hibah kepada penyelenggara dan pengawas pemilu;
5. Meningkatkan kepatuhan parpol terhadap aturan yang berlaku;
6. Sosialisasi kepada pemilih pemula;
7. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah melaporkan keberadaannya ke Pemerintah Daerah.


KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



AGUS SETIAWAN, SP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19720802 200212 1 003

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LUMAJANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si
 Jabatan : BUPATI LUMAJANG



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 01 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

 
 Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 NIP. 19720802 200212 1 003

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah terkait ipoleksosbud	Persentase masalah terkait Ipoleksosbud yang diselesaikan	66,67 %




Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.963.422.480,80	DAU
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 714.245.600,00	DAU
3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.203.255.000,00	DAU
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 297.990.000,00	DAU
5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 187.313.000,00	DAU
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.035.160.000,00	DAU
JUMLAH	Rp. 8.401.386.080,80	

Lumajang, 01 September 2025

KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





 
 Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si AGUS SETIAWAN, SP., M.Si
 NIP. 19720802 200212 1 003





2. Dokumentasi Kegiatan





No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
1	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	Jajaran Forkopimda, organisasi masyarakat, TNI/Polri, perangkat daerah, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen sipil	Hari : Rabu Tanggal : 1 Oktober 2025 Pukul : 07.30 WIB Tempat : Stadion Semeru Lumajang	Upacara berjalan lancar. Acara ini menjadi momentum refleksi kolektif tentang nilai-nilai Pancasila yang harus terus hidup dan diaplikasikan dalam keseharian masyarakat.	
2	Rapat Koordinasi Pengisian Instrumen Harmony Award 2025 bersama FKUB Kabupaten Lumajang	FKUB Kabupaten Lumajang, Bakesbangpol	Hari : Rabu Tanggal : 8 Oktober 2025 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Sekretariat FKUB Kab. Lumajang	Pengisian Instrumen Harmony Award 2025 untuk Bakesbangpol dan FKUB Kabupaten telah selesai dilaksanakan.	
3	Upacara Hari Sumpah Pemuda	Jajaran Forkopimda, organisasi masyarakat, perangkat daerah, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen sipil	Hari : Selasa Tanggal : 28 Oktober 2025 Pukul : 07.30 WIB Tempat : Stadion Semeru Lumajang	Momentum Sumpah Pemuda menjadi seruan moral untuk menyelamatkan generasi dari ancaman narkoba dan membangun masa depan yang sehat, produktif, serta berdaya saing tinggi, demi Indonesia yang bersih, kuat, dan bersatu.	


No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
4	Upacara Hari Pahlawan	Jajaran Forkopimda, organisasi masyarakat, TNI/Polri, perangkat daerah, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen sipil	Hari : Senin Tanggal : 10 November 2025 Pukul : 07.30 WIB Tempat : Stadion Semeru Lumajang	Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Kabupaten Lumajang tidak hanya menjadi upacara penghormatan, tetapi juga ajakan moral bagi generasi muda untuk meneruskan semangat juang para pendahulu dalam wajah perjuangan baru: membangun bangsa dengan ilmu, integritas, dan inovasi.	
5	Kemah Bakti Saka Anti Narkoba	Saka Anti Narkoba	Hari : Rabu – Kamis Tanggal : 19 – 20 Nov 2025 Pukul : 07.30 WIB - selesai Tempat : Senduro	Acara terdiri dari sosialisasi ke sekolah di Senduro, pembentukan karakter tim Saka Anti Narkoba, dan penyampaian materi terkait bahaya narkoba kepada tim Saka.	
6	Sosialisasi P4GN	BNNK, DPRD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa	Hari : Jumat Tanggal : 21 November 2025 Pukul : 12.30 WIB Tempat : Desa Kandangtepus	Sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat desa bersifat preventif (pencegahan) dan edukatif, sehingga masyarakat memiliki ketahanan diri yang kuat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba.	

No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
7	Sosialisasi P4GN	BNNK, DPRD, guru BK SMP/ sederajat	Hari : Rabu Tanggal : 26 November 2025 Pukul : 08.30 WIB Tempat : SMPN 1 Sukodono	Sosialisasi bahaya narkoba kepada guru BK bersifat edukatif dan diteruskan kepada sekolah.	
8	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN	BNNK, Polres, Kodim 0821, dan perangkat daerah terkait	Hari : Kamis Tanggal : 11 Desember 2025 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Ruang Terbatas Setda	Tersusunnya dokumen P4GN 2025	
9	Upacara Hari Bela Negara	Jajaran Forkopimda, organisasi masyarakat, TNI/Polri, perangkat daerah, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen sipil	Hari : Selasa Tanggal : 23 Desember 2025 Pukul : 07.30 WIB Tempat : Stadion Semeru Lumajang	Upacara Hari Bela Negara menjadi momentum reflektif untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai bela negara harus terus hidup dan relevan dalam setiap fase perjalanan bangsa.	





No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
10	Monitoring dan Evaluasi FKUB Kabupaten Lumajang	FKUB, Bakesbangpol	Hari : Rabu Tanggal : 31 Desember 2025 Pukul : 08.30 WIB Tempat : Sekretariat FKUB	Laporan pelaksanaan kegiatan FKUB tahun 2025 akan disampaikan pada 6 Januari 2026.	 
11.	Seminar Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Hari : Kamis Tanggal : 5 Juni 2025 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Alka Café, Jl. Srikaya Kutorenan Sukodono Kabupaten Lumajang	Bertambahnya peran dan keikutsertaan wanita dalam melaksanakan program-program Pemerintah Daerah	 

No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	Diskusi Publik Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Hari : Kamis Tanggal : 5 Juni 2025 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Alk Gedung TP- PKK, Jl. Arif Rahman Hakim No.10, Ditotrunan, Lumajang	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan wanita dalam Pembangunan Daerah	 
12.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hibah Ormas	Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Kantor Sekretariat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lumajang Rabu, 31 Desember 2025 Pukul 09.00 WIB	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	 

No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
13.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Partai Politik	Pengurus Partai Politik	<p>Hari : Selasa - Jumat</p> <p>Tanggal : 16 -19 Desember 2025</p> <p>Pukul : 09.00 WIB</p> <p>Tempat : Kantor Sekretariat masing-masing partai politik</p>	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	   

No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
					


No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
					
	kegiatan Expose pemusnahan hasil penindakan rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya yang diselenggarakan oleh Kantor Bea dan Cukai Probolinggo	dihadiri 50 orang dengan penanggung jawab Bapak Rudi Bayu Widjatnoko (Kepala Kantor Bea dan Cukai Probolinggo)	Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2025 pukul 09.25 s.d 11.00 WIB, bertempat di Stadion Semeru Lumajang alamat Jln. Gajah Mada Nomor 1, Kel. Kepuharjo Kec / Kab. Lumajang		 


No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum.		Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 12.00 sampai 13.30 WIB bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang		 
	Kunker Gubernur Jawa Timur (Dr. (HC). Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si) dalam rangka Penyerahan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolahan Gula Kalapa	250 orang dengan penanggung jawab Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si (Bupati Lumajang).	hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 pukul 08.00 s.d 15.25 WIB, bertempat di Wilayah Kab. Lumajang		 


No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	dan AEP lainnya,				
	Serah terima bantuan Becak Listrik dari Presiden RI bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Kab. Lumajang	80 orang	hari Sabtu, 13 Desember 2025 pukul 14.20 s.d 15.30 WIB bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Kab. Lumajang alamat Jl. Alun-alun Selatan Kel. Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang		 
	Kegiatan Khotmil Qur'an dan Istighosah Kubro Harjalu ke 770 oleh Bupati dan		hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 08.25 WIB bertempat di Pendopo Arya Wiraraja alamat jl. Alun alun selatan kelurahan Ditotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang		




No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	wakil Bupati Lumajang				
	Prosesi Hari Jadi Lumajang (Harjalu) Ke-770 Tahun 2025	diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lumajang sebagai penanggung jawab kegiatan Plt. Kepala Dindikbud Kab. Lumajang Ari Murcono, S.STP., M.Si.	hari Senin 15 Desember 2025 pukul 08.00 WIB bertempat Pendopo Arya Wiraraja alamat alamat jl. Alun alun selatan kelurahan Ditotrunan Kec/Kab. Lumajang		 
	kegiatan Konvensi Pengawasan Aksi Basmi Korupsi dalam rangka		Senin tanggal 22 Desember 2025, pukul 10.00 wib s/d 14.00 wib, bertempat di Gor Wira Bhakti Kab. Lumajang		

No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	Peringatan HARJALU ke 770 dan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025 di Kab. Lumajang.				
	kegiatan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara Ke-77 Tahun 2025		Selasa tanggal 23 Desember 2025 Pukul 07.30 WIB, bertempat Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang		
	kegiatan Doa Bersama Akhir Tahun 2025 yang	melibatkan unsur Forkopimda, Forkopimda Plus, DPRD, OPD,	Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 19.00 WIB s/d 21.27 WIB, bertempat di		




No	Kegiatan	Unsur Undangan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Hasil	Dokumentasi
	diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang	tokoh agama, tokoh politik, serta tokoh masyarakat.	Pendopo Kabupaten Lumajang		

	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Kabupaten Lumajang		Rabu tanggal 1 Oktober 2025, Pukul 07.30 WIB, bertempat di Stadion Semeru Kabupaten Lumajang. Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang		 
--	---	--	--	--	---

<p>Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) Dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.</p>		<p>Kamis tanggal 16 Oktober 2025 bertempat di Hotel Aston Inn alamat Jl. Panglima Besar Sudirman No. 116 Kelurahan Tompokersan Kec/Kab. Lumajang</p>		
<p>Lumajang Bersholawat Dan Doa bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025 di</p>		<p>Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB bertempat di Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang</p>		

	Kabupaten Lumajang.				
	kegiatan Upacara Ziarah Nasional Dalam Rangka Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan tema "Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan"		Senin tanggal 10 November 2025 Pukul 06.00 WIB bertempat di TMP Kusuma Bangsa Kab. Lumajang alamat Jl. Jendral Ahmad Yani No.29, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang		 
	kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan	diikuti sekitar 850 orang dengan Irup AKBP Alex Sandy Siregar, S.I.K, S.H, M.H	Senin tanggal 10 November 2025 pukul 07.30 s.d 08.30 WIB bertempat di Stadion Semeru Lumajang alamat Jl.		

10 November Tahun 2025	(Kapolres Lumajang), Paup AKP Syaiku, SH (Kasat Samapta Polres Lumajang) dan Danup AKP Soegeng Susanto, SH (Kapolsek Pronojiwo).	Gajah Mada Kel. Kepuharjo Kec/Kab. Lumajang		
Pisah Kenal Ketua Pengadilan Negeri Lumajang.		Sabtu 15 November 2025 pukul 20.17 WIB bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang alamat jl. Alun alun selatan kelurahan Ditotrunan Kec. Lumajang		
Kunjungan Kerja oleh Timwas DPR RI dalam rangka		Rabu, tanggal 26 November 2025, Pukul 10.35 WIB s.d 14.30 WIB bertempat di Wilayah Kab. Lumajang		

<p>Penanganan Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kab. Lumajang</p>				
<p>kegiatan Apel Hari Santri Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PCNU Kab. Lumajang yang diikuti sekitar 5000 orang dengan penanggung jawab Dr. KH. Mohammad</p>		<p>Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 07.10 s.d 09.30 WIB bertempat di Stadion Srikandi Kec. Tempeh Kab. Lumajang alamat Jl. Raya Dusun Kebonsari Desa Tempeh Tengah Kec Tempeh Kab. Lumajang</p>		 

<p>Darwis, M.Pd.i (Ketua PCNU Lumajang).</p>				
<p>Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke- 97 Tahun 2025 Kab. Lumajang "dengan tema "Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu"</p>		<p>Selasa tanggal 28 Oktober 2025 Pukul 07.30 WIB, bertempat Stadion Semeru Lumajang alamat Jl. Gajah Mada No.1, Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang</p>		